

Kebijakan Inovasi dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Dumai

Ulil Amri¹, Adianto², Hasim As'ari³

^{1,2,3} Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Riau

e-mail : ulil.amri1790@grad.unri.ac.id

Abstrak

Dalam rangka mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel serta berkualitas, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan kebijakan inovasi yang berbasiskan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Kebijakan Inovasi Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Dumai yang diukur dengan menggunakan tiga dimensi kebijakan inovasi yaitu: 1).Dimensi Penadbiran kebijakan (tata kelola)/*policy governance*, 2).Dimensi Sektoral dan 3).Dimensi Interaksi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data-data yang diperlukan baik data primer maupun skunder dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, kemudian dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari masalah penelitian yang ada. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan Kebijakan Inovasi Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di Dumai sudah berjalan dengan cukup baik. Adapun hambatan-hambatan yang ada, yaitu: keterbatasan SDM yang memiliki keahlian teknis TIK, sistem aplikasi yang belum terintegrasi dan kurangnya dukungan anggaran untuk pengembangan inovasi berbasis SPBE.

Kata Kunci : Inovasi, Kebijakan Inovasi, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Abstract

In order to realize the quality of government administration that is effective, efficient, transparent, and accountable as well as quality, local governments can carry out innovation policies based on the Electronic-Based Government System (SPBE). SPBE in Dumai City which is measured using three dimensions of innovation policy, namely: 1). Dimensions of policy governance, 2). Sectoral Dimensions and 3). Dimensions of Interaction. This type of research is a qualitative research with a descriptive approach. The data collection needed, both primary and secondary data, was collected through interviews, observation, documentation, and then analyzed so that conclusions can be drawn from the existing research problems. The results of this study are the implementation of the Innovation Policy in the Implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE) in Dumai has been running quite well. The existing obstacles are: limited human resources with ICT technical expertise, application systems that are not yet integrated and lack of budget support for the development of SPBE-based innovations.

Keywords: Innovation, Innovation Policy, Electronic-Based Government System (SPBE)

PENDAHULUAN

Proses globalisasi yang tidak terpisahkan dari masyarakat modern pada saat ini menuntut pemerintah lebih terbuka, efektif, efisien, transparansi dan akuntabel melaksanakan tugas-tugasnya dalam memberi akses informasi terkait pemerintahan sehingga dapat mempercepat pemerintah melaksanakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu upayanya yaitu dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau yang sering disebut *e-Government*, hubungannya dalam

mewujudkan pelayanan publik yang dianggap *good governance* adalah bukti penting bagi pemerintah untuk menyesuaikan kemajuan teknologi yang ada supaya tidak tertinggal.

Selanjutnya secara konsep, inovasi dibutuhkan untuk kualitas pelayanan publik, yang mana mempunyai makna suatu hal yang memperkenalkan inovasi merupakan suatu cara, metode baru atau gabungan lama dan baru untuk menyelesaikan serta memberi alternatif baru dalam pengelolaan pemerintahan (Suhono Harso Supangkat dalam Fathur Rahman dan Janwan S.R. Tarigan (2020:14), sehingga memberikan manfaat lebih bagi pemakainya yaitu masyarakat dan terkhususnya bagi Aparatur Sipil Negeri (ASN) sebagai penyelenggara tugas negara. Inovasi dalam pelayanan publik memiliki ciri khas yaitu sifatnya yang tidak bisa diraba atau tidak berwujud karena inovasi layanan dan organisasi tidak semata berbasis pada produk yang tidak dilihat melainkan pada perubahan dalam hubungan pelakunya yaitu antara berbagai bagian di dalam organisasi atau mitra sebuah organisasi.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan SPBE yaitu sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Penerapan layanan *e-Government* atau SPBE bukan saja dipahami sebagai bentuk pengalihan kerja instansi pemerintah dari sistem kerja manual ke sistem komputerisasi atau berbasis digital/online, tapi secara filosofis penerapan *e-Government* merupakan bentuk kerja birokrasi yang secara dinamis mengalami *distorsi* pada lingkungan eksternal organisasi atau adanya tuntutan yang mengharuskan suatu perubahan.

Sebagai percepatan layanan inovasi berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tepatnya di Kota Dumai, maka dibuatlah Peraturan Walikota Dumai Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai. Kebijakan ini dibuat sebagai dasar untuk proses percepatan dalam pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) pemerintahan yang ideal pada tata kelola informasi daerah yang berbasis elektronik/digitalisasi yang selama ini masih lambat dan dirasakan berjalan di tempat.

Lahirnya kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang sejatinya untuk kemudahan penggunaannya ternyata belum menunjukkan secara maksimal dalam pelaksanaannya. Seperti untuk melaksanakan komunikasi di dalam internal pemerintahan, pelayanan publik, serta pelaksanaan proses administrasi perkantoran antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni dengan memanfaatkan administrasi surat menyurat yang masih bersifat konvensional (*paper-based administration*). Aktivitas administrasi surat menyurat merupakan salah satu aktivitas di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak pernah sepi, sehingga tidak heran jika kita sering melihat tumpukan-tumpukan kertas di meja para staf. Hal yang sangat lumrah jika aktivitas surat menyurat masih terus dilakukan, baik antar instansi pemerintah maupun pemerintah kepada masyarakat. Persuratan bertujuan untuk menyampaikan informasi tertulis dan pesan secara kedinasan yang dibuat dan di terima oleh pejabat yang berwenang dalam kegiatan administratif. Sehingga isi dari sebuah surat harus bersifat informatif dan ditulis secara jelas maksud serta tujuannya. Bahkan beberapa jenis surat masuk sebagai alat bukti yang sah, terutama jenis surat perjanjian. Oleh karena itu, sudah selayaknya instansi menjaga surat-surat sebagai bukti yang otentik. Realitanya hingga saat sekarang cara manual/konvensional (*paper-based administration*) masih terus digunakan dalam persuratan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Dumai.

Sayangnya, dengan kemajuan teknologi yang sudah modern saat ini ternyata belum mampu menghilangkan kegiatan persuratan secara manual/konvensional tersebut di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Dumai. Sehingga istilah *good governance* (tata pemerintahan yang baik) yang terus digadag-gadangkan oleh para pejabat masih belum bisa membawa kemajuan terhadap tradisi persuratan yang lebih modern. Persuratan secara manual/konvensional di instansi Pemerintahan justru membawa pada permasalahan yang

lebih kompleks. Tidak hanya terkait sistem pengarsipan yang rumit dan berbelit, namun juga tidak adanya unsur efektif dalam pekerjaan semacam itu.

Beberapa permasalahan dan kelemahan yang akan dialami jika masih menggunakan cara manual/konvensional (*paper-based administration*) dalam persuratan di instansi pemerintahan, diantaranya : sulitnya proses *tracking* disposisi persuratan yang berasal dari Instansi pemerintahan, resiko banyaknya dokumen surat sering terselip dan bahkan hilang akibatnya banyak surat yang diterbitkan maka timbul sulitnya untuk pengarsipan, tidak terintegrasinya, membutuhkan ruangan khusus pengarsipan karena banyak surat yang bertumpuk-tumpuk, terjadinya pemborosan anggaran disebabkan banyaknya pembelian alat tulis kantor ditambah lagi diperlukan waktu yang cukup lama dalam proses pencarian dokumen.

Belum lagi permasalahan lainnya yang sering timbul seperti masih rendahnya budaya berbagi data dan informasi antar instansi pemerintah (sistem aplikasi yang belum terintegrasi) sehingga semakin menyulitkan komunikasi antar instansi pemerintah yang saling terkait untuk peningkatan fasilitas dan pelayanan publik yang menjamin untuk mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel dalam mendapatkan data yang akurat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka dibutuhkan suatu kebijakan yang berbasiskan SPBE yaitu sebuah kebijakan inovasi. Inovasi merupakan cara baru menggantikan cara lama dalam mengerjakan atau memproduksi sesuatu. Namun demikian, inovasi mempunyai dimensi geografis yang menempatkannya baru pada satu tempat, namun boleh jadi merupakan sesuatu yang lama dan biasa terjadi di tempat lain. (Suwarno, 2008:16). Seterusnya Tatang A. Taufik (2005:49) memberi penjelasan kebijakan inovasi yaitu merupakan kelompok kebijakan yang mempengaruhi kemajuan-kemajuan teknis dan bentuk inovasi lainnya, yang pada dasarnya bertujuan : Membangun/mengembangkan kapasitas inovatif setiap "simpul" (fungsi/kegiatan/proses) dalam sistem inovasi, meningkatkan/memperlancar aliran pengetahuan dalam dan antarfungsi/kegiatan/proses dalam sistem inovasi (ini juga berarti meningkatkan proses pembelajaran dalam sistem), dan, memperkuat hubungan dan keterkaitan rantai nilai vertikal dan horisontal antar-fungsi/kegiatan/proses produksi, litbang, adopsi dan difusi (termasuk komersialisasi) dan fungsi/kegiatan/proses penunjang dalam sistem inovasi.

Menurut Tatang A. Taufik (2005:50) upaya dalam mendorong koherensi kebijakan inovasi juga sangat penting, mengingat karakteristik inovasi beserta kecenderungan fenomena baru terkait dengan inovasi, dan pendekatan sistem inovasi berimplikasi pula pada pergeseran dalam kebijakan inovasi. Diantara isu penting adalah menyangkut tiga dimensi kebijakan inovasi yakni sebagai berikut:

1. Dimensi penadbiran kebijakan (*policy governance*): bahwa kebijakan inovasi dapat ditentukan pada beragam tataran (lokal, daerah, nasional dan internasional), di mana koherensi dan komplementasi satu dengan lainnya sangat penting;
2. Dimensi sektoral, bahwa terdapat beragam faktor yang akan memberikan pengaruh umum serupa walaupun dengan tingkat yang berbeda dan pengaruh yang mungkin bersifat spesifik sektor. Karenanya, respons kebijakan yang dikembangkan perlu mempertimbangkan hal ini;
3. Dimensi interaksi, bahwa kebijakan inovasi seringkali perlu diimplementasikan melalui kebijakan lainnya. Karenanya, konsepsi inovasi dan sistem inovasi perlu semakin lekat/terpadu dalam beragam kebijakan terkait lainnya.

Kebijakan inovasi secara konsep bertumpu pada pendekatan sistem terhadap proses inovasi (memanfaatkan pendekatan serta kerangka sistem inovasi untuk menterjemahkan implikasi kebijakan-kebijakannya). Namun didalam perkembangan prakteknya, kebijakan inovasi bukan saja menjadi kebijakan horizontal, tetapi terkait dengan bidang tradisional lainnya, seperti kebijakan ekonomi (secara umum), kebijakan industri (dalam arti sektoral) dan kebijakan iptek. Berdasarkan pemahaman yang ada dapat disimpulkan kebijakan inovasi yaitu berpijak pada pendekatan sistem terhadap proses inovasi atau dengan kata lain menggunakan perspektif sistem inovasi untuk menterjemahkan implikasi kebijakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun subjek informan adalah 6 (enam) orang yang terdiri dari 4 (empat) orang dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai, yaitu Kepala Dinas pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai, Kepala Bidang Layanan Aplikasi e-Government, Kepala Seksi Tata Kelola e-Government, Staf pelaksana, dan 2 (dua) orang dari Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Dumai, yaitu Kepala Badan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai dan Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dari informan dan data sekunder yaitu data atau dokumen yang berasal dari RPJMD, Renstra, Renja, Jurnal, tesis dan berita media online, SOTK Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai, SOTK Badan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai serta dari peraturan-peraturan yang terkait dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah observasi dan wawancara dan dokumentasi. Proses analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian atau display data dan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya, pelaksanaan kebijakan inovasi adalah suatu keharusan dalam rangka peningkatan tata kelola Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Hal ini semakin memperkuat dan relevan bahwa kebijakan inovasi khususnya di Kota Dumai, sudah bukan lagi pilihan namun masuk dalam kategori kewajiban yang harus dilaksanakan. Yang mana kebijakan inovasi yang dilakukan sebagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu dalam rangka peningkatan kualitas layanan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, dengan menggunakan 3 (tiga) dimensi kebijakan inovasi yang dijabarkan oleh Tatang A. Taufik, sebagai berikut :

Dimensi Penadbiran Kebijakan (*policy governance*) Tata Kelola

Bahwa kebijakan inovasi dapat ditentukan oleh tata kelola pada beragam tataran (lokal, daerah, nasional dan internasional), di mana koherensi dan komplementasi satu dengan lainnya sangat penting. Jadi sebenarnya dalam kondisi sekarang, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sama-sama memiliki peran penting dan bertanggungjawab atas keberhasilan kebijakan inovasi. Yang mana pada masa lampau, kebijakan inovasi sepenuhnya berada di Pemerintah pusat namun pada masa sekarang.

Selanjutnya dalam tatanan tata kelola kelembagaan dan kebijakan yang mendorong dalam penyelenggaraan kebijakan inovasi SPBE di Kota Dumai bahwasannya sudah terbentuk dan berjalan dengan cukup baik, dapat dibuktikan dengan diterbitnya Peraturan Walikota Dumai Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai, Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor 360 tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Dumai tahun 2021 dan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor 361 tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai tahun 2021.

Dimensi sektoral

Bahwa terdapat beragam faktor yang akan memberikan pengaruh umum serupa walaupun dengan tingkat yang berbeda dan pengaruh yang mungkin bersifat spesifik sektor bahwasan respons kebijakan inovasi yang dikembangkan perlu mempertimbangkan berbagai faktor, karena kekhasan masing-masing. Yang mana kita tidak bisa menyamaratakan bahwa untuk mengatasi suatu persoalan diatasi dengan kebijakan yang sama untuk semua sektor, yakni berjalan kurang baik. Hal ini disebabkan dengan pelaksanaan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang harus di dukung

oleh tata kelola kebijakan sektoral. Seperti belum integrasinya beberapa aplikasi yang ada di Pemerintah Kota Dumai, kurangnya sarana prasarana dan kebutuhan sumber daya.

Dimensi Interaksi

Bahwasannya dimensi interaksi dengan bidang kebijakan lainnya, yakni kebijakan inovasi seringkali perlu diimplementasikan melalui kebijakan lainnya. Karenanya, konsepsi inovasi dan sistem inovasi perlu semakin lekat/terpadu dalam beragam kebijakan terkait lainnya. Kebijakan inovasi pada dasarnya berupa kebijakan yang dapat dilakukan di setiap kementerian dengan kewenangannya masing-masing. Oleh sebab itu dari perspektif kebijakan inovasi, kebijakan-kebijakan tersebut perlu disinkronkan agar tidak tumpang tindih atau bahkan saling bertentangan atau saling menghilangkan dampaknya sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan Kepala Daerah yang sangat mendukung dan menggesa penyelenggaraan SPBE di Kota Dumai, ini mengingatkan akan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel merupakan suatu cita-cita setiap Kepala Daerah yakni dengan melibatkan partisipasi semua OPD.

Faktor penghambat

Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan inovasi dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian teknis

Bahwasannya sumber daya manusia mempunyai peranan penting dalam melaksanakan kebijakan inovasi SPBE, tanpa adanya sumber daya sebuah kebijakan yang ditetapkan pemerintah tidak akan bisa berjalan efektif dan efisien. Hasil dari temuan dilapangan juga menemukan bahwa SDM tersebut belum berstatus Pegawai Negeri Sipil, namun merupakan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kontrak (TKPK) yang artinya bahwa bisa saja setiap waktu mengundurkan diri atau memutuskan hubungan kerja dengan pemerintah tepatnya dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai. Kondisi ini sangatlah mengkhawatirkan bagi kelangsungan pelaksanaan kebijakan inovasi dalam penyelenggaraan SPBE di masa yang akan datang.

2. Proses sistem aplikasi yang belum terintegrasi

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini semakin cepat berkembang dengan pesatnya, yang semula dikerjakan secara manual sekarang sudah bisa lebih mudah dan cepat dikerjakan menggunakan Sistem aplikasi secara digitalisasi. Jika sistem aplikasi yang ada di OPD berjalan dengan sendiri-sendirnya (parsial) akan berdampak menjadi *redudansi* aplikasi, tidak sinkron, dan belum memiliki standard layanan data yang baik.

3. Kurangnya dukungan pendanaan atau anggaran

Kurangnya dukungan anggaran dalam penyelenggaraan inovasi SPBE menjadi salah satu alasan umum kegagalan dalam proses inovasi. Jika inovasi SPBE tidak didukung dengan anggaran yang maksimal selama prosesnya, inovasi tersebut mungkin akan kehilangan momentum. Anggaran dalam perencanaan anggaran pada OPD untuk inovasi ibarat sebuah komitmen dari organisasi untuk mencapai dan menciptakan sesuatu yang luar biasa.

Padahal, untuk meningkatkan perkembangan dan peningkatan daya saing bangsa yang menuju *good governance* khususnya dalam bidang pembaharuan kebijakan inovasi, dukungan anggaran mutlak diperlukan. Proses ini tidak bisa dilakukan secara instan, perlu usaha jangka panjang dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah diuraikan di depan terhadap pelaksanaan Kebijakan Inovasi Dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik (SPBE) di Kota Dumai, setelah masing-masing indikator diidentifikasi dan diuraikan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwasannya pelaksanaan Kebijakan Inovasi dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Dumai telah berjalan dengan cukup baik. Ini dapat diketahui melalui beberapa indikator, yaitu *a*). Dimensi penadbiran kebijakan (*policy governance*), yang sudah memiliki kelembagaan dan dasar hukum yakni dalam bentuk Peraturan Walikota Dumai dan Surat Keputusan Walikota, *b*). Dimensi sektoral bahwa terdapat beragam faktor yang akan memberikan pengaruh umum serupa walaupun dengan tingkat yang berbeda dan pengaruh yang mungkin bersifat spesifik sektor, berjalan kurang baik, hal ini disebabkan dengan pelaksanaan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang harus di dukung oleh tata kelola kebijakan sektoral. Seperti belum integrasinya beberapa aplikasi yang ada di Pemerintah Kota Dumai, kurangnya sarana prasarana dan kebutuhan sumber daya, dan *c*). Dimensi interaksi dengan bidang kebijakan lainnya, bahwa kebijakan inovasi seringkali perlu diimplementasikan melalui kebijakan lainnya. Karenanya konsepsi inovasi dan system inovasi perlu semakin lekat/terpadu dalam beragam kebijakan terkait lainnya, sudah berjalan dengan cukup baik, yakni dengan dukungan Kepala Daerah untuk menggesa penyelenggaraan SPBE di Kota Dumai yaitu agar melaksanakan aplikasi perkantoran surat menyurat (*e-Office*), daftar hadir secara elektronik (*e-absensi*) dan pengimputan aplikasi data dan informasi (*datin.dumai.go.id*) yang merupakan amanah dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI).
2. Terdapat 3 (tiga) faktor penghambat dalam pelaksanaan Kebijakan Inovasi dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Dumai yakni : *a*). kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian teknis, *b*). proses sistem aplikasi yang belum terintegrasi, *c*). kurangnya dukungan pendanaan atau anggaran.

SARAN

Saran yang diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan instansi terkait untuk menunjang pelaksanaan kebijakan inovasi dimasa yang mendatang :

1. Kebijakan Inovasi dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Dumai telah berjalan dengan cukup baik, agar dapat ditingkatkan dengan lebih melengkapi dokumen administrasi pendukung guna mengikuti penilaian indeks inovasi daerah, serta selalu melakukan sosialisasi dan implementasi kebijakan, dan terus melakukan pemantauan dan evaluasi SPBE bagi OPD se-Kota Dumai.
2. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian teknis sebagaimana yang diperlukan dalam pelaksanaan implementasi dari kebijakan inovasi, dapat diusulkan kepada OPD Dinas Komunikasi, informatika, statistik dan Persandian Kota Dumai dengan memasukkan ke peta jabatan ASN. Selanjutnya agar data dan informasi tidak menjadi *redudansi* data aplikasi, tidak sinkron, dan belum memiliki standard layanan data yang baik, maka bisa memaksimalkan pengelolaan data pada saat *Forum Group Discussion* (FGD) Data se-Kota Dumai. Untuk dukungan pendanaan dapat memasukkan perencanaan dan penganggaran kegiatan melalui renstra dan renja OPD Dinas Komunikasi, informatika, statistik dan Persandian Kota Dumai dengan semaksimal mungkin dengan melakukan koordinasi kepada pihak-pihak terkait seperti kepada OPD BAPPEDALITBANG Kota Dumai dan OPD BPKAD Kota Dumai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah dan Rusfiana. 2016. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Adianto. 2020. *Inovasi Sosial: Praktek adopsi inovasi yang memberikan dampak kesejahteraan*. Pekanbaru: Taman Karya
- Ancok, Djamaludin. 2012. *Kepemimpinan dan Inovasi*. Jakarta: Erlangga
- Putera, Prakoso Bhairawa. 2014. *Policy Review: Teori dan Aplikasi Pada Kebijakan IPTEK dan Inovasi*. Jakarta: Graha Ilmu

- Putera, Prakoso Bhairwa. 2014. *Kebijakan Inovasi di Daerah: Dalam Tatanan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002*. Jakarta: LIPI Press
- Rahman, Fathur & S.R Tarigan, Janwan. 2020. *Inovasi Pemerintahan Menuju Tata Kelola Pemerintahan Daerah Ideal*. Jakarta: Instrans Publising.
- Roggers. Everret. M. 1983, *Diffusion and Innovation Three Edition*. New York : The Free Pres
- Taufik, Tatang A. 2005. *Pengembangan Sistem Inovasi Daerah: Perspektif Kebijakan*. Jakarta: Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Unggulan Daerah dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan teknologi (BPPT)
-, 2010. *Kemitraan Dalam Penguatan Sistem Inovasi Nasional*. Jakarta: Dewan Riset Nasional
- Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik : Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta : Universitas Moestopo Beragama
- 2018. *Teori dan perkembangan manajemen pelayanan publik*. Jakarta : UMJ Press
- Zulhakim, A.Aziz,2012, *Mengenal e-Government (Pemahaman Konsep Aplikasi e-Government Sebagai Inovasi Pelayanan Publik)*. Bengkulu: FISIPOL Bengkulu

Jurnal

- Taufik, Tatang A, 2001. *Perspektif Kebijakan: Pendekatan Klaster Dalam Pengembangan Unggulan Daerah” dalam Taufik A., dan Subagio Ign (Eds)*. 2001. *Menumbuhkembangkan Pemanfaatan Sumber Daya Lokal dan Perlindungan Aset Intelektual Bangsa*.
-, 2006. *Sistem Inovasi: Pendekatan dan Penabdiran*, Jakarta: Diskusi Sistem Inovasi DRN 9 Maret 2006
-, 2006. *Strategi Dual Pengembangan Industri TIK Nasional*. Disampaikan dalam seminar Sistem Inovasi Nasional “Kebijakan publik dalam memacu kapasistas Inovasi Industri”, Hotel Crowne Plaza, 19-20 Juli 2006
-, 2007. *Membangun Masyarakat yang inovatif dan kreatif: Kebijakan Inovasi di Indonesia: Bagaimana Sebaiknya?*, *Jurnal Dinamika Masyarakat*, Vol.VI, No.2 Agustus 2007. Hal.1167
-, 2008. *Konsep dan Prakarsa Implementasi Metode Koordinasi Terbuka Untuk Mendukung Koherensi Kebijakan Inovasi*
-, 2013. *Contoh Implementasi Penguatan Sistem Inovasi di Beberapa Kabupaten/Kota*. *Workshop DRN-DRD “Penguatan Sumberdaya, Kelembagaan dan Jaringan Iptek Pusat dan Daerah untuk Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Bangsa”*. Ruang Komisi Utama BPPT, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Jakarta, 4 Desember 2013